

Informasi Paket

Pengumuman

Peserta

Hasil Evaluasi

Pemenang

Pemenang Berkontrak

Kode Paket	15912012		
Nama Paket	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur		
Rencana Umum Pengadaan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana
	49241357	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	APBD
Uraian Singkat Pekerjaan	📄 Uraian Singkat Pekerjaan.pdf		
Tanggal Pembuatan	28 Maret 2024		
Tahap Paket Saat Ini	Paket Sudah Selesai		
K/L/PD/Instansi Lainnya	Provinsi Kalimantan Tengah		
Satuan Kerja	Badan Kepegawaian Daerah		
Jenis Pengadaan	Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi		
Metode Pengadaan	Pengadaan Langsung		
Khusus Orang Asli Papua (OAP)	Tidak		
Tahun Anggaran	APBD 2024		
Nilai Pagu Paket	Rp. 40.410.306,00	Nilai HPS Paket	Rp. 40.290.000,00
Jenis Kontrak	Lumsum		
Lokasi Pekerjaan	▪ Palangka Raya - Palangka Raya (Kota)		
Syarat Kualifikasi	Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas		
	Izin Usaha		
	Jenis Izin	Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi	
	SBU dan atau NIB	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian	
	Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas		
	Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.		
	Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa		
	Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan d) Kartu Tanda Penduduk.		
	Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi: a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam; c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain; d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan; e) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; f) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;		